



PEDOMAN PELAKSANAAN

PEMANTAUAN DAN EVALUASI



**PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(PNPM) MANDIRI**



SAMBUTAN

Untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di berbagai aspek pembangunan, maka PNPM Mandiri turut pula mengembangkan upaya-upaya dalam pengamanan (safeguarding) program-program sektor di bawah koordinasinya.

Salah satu komponen safeguarding yang dikembangkan adalah Monitoring dan Evaluasi yang terpadu dan melibatkan multi pihak, baik pelaksana program maupun pihak-pihak independen. Pelaksana program dilibatkan dalam kegiatan Monev ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab terhadap program yang dikelolanya, sedangkan pihak-pihak independen yang termasuk pula masyarakat luas diharapkan keterlibatannya sebagai bentuk kepedulian dan rasa kepemilikannya terhadap program yang dilaksanakan di lingkungannya.

Monev yang dikembangkan oleh PNPM Mandiri menjadi satu kesatuan dengan mekanisme Pengelolaan Pengaduan dan Masalah (PPM) dan Management Information System (MIS) PNPM Mandiri.

Dengan ketiga instrumen safeguarding tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran pelaksanaan program secara utuh, permasalahan-permasalahan yang timbul, masukan-masukan dari berbagai pihak, dan tindak lanjut yang diperlukan segera sehingga penyesuaian dan langkah-langkah strategis yang diperlukan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat terhadap program.

Pada akhirnya melalui penerbitan pedoman ini, diharapkan berbagai pihak dapat lebih jelas bentuk keterlibatannya di dalam pengawasan program serta pihak-pihak yang dapat menjadi mitra dalam menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang ada.



Kritik dan masukan selalu diharapkan demi penyempurnaan pedoman ini.

Jakarta, April 2008

Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan selaku Ketua Pelaksana
Tim Pengendali PNPM Mandiri

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sujana Royat'.

Sujana Royat



Persoalan kemiskinan sering dipahami sebagai suatu persoalan yang bersifat kompleks, multi dimensi, dan struktural sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehensif. Pembelajaran pengalaman selama ini mengedepankan kemandirian dan gerakan kolektif antar masyarakat, pemerintah maupun berbagai pihak terkait lainnya di daerah sebagai salah satu kunci penanggulangan kemiskinan.

Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, pemerintah telah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri, upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak diharapkan dapat dilaksanakan secara bersinergi dan lebih terarah pada kelompok masyarakat miskin dan wilayah tertinggal.

Pemantauan dan evaluasi merupakan instrumen pengelolaan kebijakan publik yang sangat kuat untuk membantu pengambil keputusan dan pelaksana melihat kemajuan dan dampak proyek, program, atau kebijakan PNPM Mandiri. Untuk mengetahui efektivitas PNPM Mandiri dalam upaya pengurangan kemiskinan, PNPM Mandiri dilengkapi dengan pedoman pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ini.

Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PNPM Mandiri berisi kerangka kerja pemantauan dan evaluasi yang berbasis hasil. Untuk itu, pada pedoman ini menjelaskan ruang lingkup, mekanisme, dan jenis pemantauan dan evaluasi, serta indikator-indikator pencapaian kinerja PNPM Mandiri. Dalam pemantauan dan evaluasi yang berbasis hasil, selain masukan, dan keluaran, pemantauan dan evaluasi PNPM Mandiri menekankan pada hasil/keluaran (*outcome*) dan dampak (*impact*).

Membangun dan mempertahankan sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil bukanlah hal mudah. Hal ini membutuhkan komitmen, waktu, usaha, dan sumber daya yang berkesinambungan. Untuk itu, dukungan semua pihak untuk mengacu dan mengembangkan kerangka



pemantauan dan evaluasi yang ada pada pedoman ini sangat diharapkan. Berbagai saran dan kritik diperlukan bagi perbaikan pedoman ini dan pengembangan PNPM Mandiri ke depan.

Jakarta, April 2008

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

Sambutan	2
Prakata	4
Bagian I. Pendahuluan	8
Bagian II. Tujuan PNPM Mandiri	10
2.1. Mengapa Pemantauan dan Evaluasi PNPM Mandiri Penting? ...	10
2.2. Prinsip-prinsip Pemantauan dan Evaluasi	11
Bagian III. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi PNPM Mandiri	14
3.1 Peran Konsultan/Fasilitator	17
3.2. Peran Masyarakat Sipil/ Kelompok Peduli dan Kelompok Masyarakat	19
Bagian IV. Penanggung Jawab Pemantauan dan Evaluasi PNPM Mandiri	23
4.1. Tolok Ukur Program PNPM Mandiri	23
4.2. Tolok Ukur Program Sektor	24
4.3. Tolok ukur Kepuasan Penerima Manfaat (Beneficiaries)	26
Bagian V. Cakupan Pemantauan dan Dievaluasi	28
5.1. Pemantauan dengan Partisipasi Masyarakat	28
5.2. Pemantauan oleh Pemerintah	30
5.3. Pemantauan oleh Konsultan dan Fasilitator	30
5.4. Sistem Pengelolaan Informasi (SPI)	31
5.5. Pemantauan oleh LSM	32
5.6. Pemeriksaan Keuangan	32
Bagian VI. Jenis Pemantauan	34
6.1. Evaluasi Keluaran (Output)	34



6.2. Evaluasi Dampak (Impact)	34
6.3. Studi Khusus/Tematik	35
Bagian VII. Jenis Pemantauan	37
Bagian VIII. Pelaporan	38
LAMPIRAN	
Lampiran A. Kerangka Logis PNPM Mandiri	39
Lampiran B. Ringkasan Indikator Inti	46
Lampiran C. Contoh Pertanyaan untuk Pemantauan	50



Di antara permasalahan utama pembangunan Indonesia adalah masih besarnya jumlah penduduk miskin. Sebagai upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program Nasional ini dimulai pada tahun 2007 dan akan berlangsung setidaknya sampai dengan 2015.

PNPM Mandiri merupakan upaya pemerintah untuk mengharmonisasi program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Selama ini program-program tersebut dilaksanakan secara sektoral dan parsial dengan pendekatan dan prosedur yang beragam. Harmonisasi prinsip, kriteria dan prosedur melalui PNPM Mandiri diharapkan akan mengurangi inefisiensi dan inefektivitas pengelolaan program-program pemberdayaan masyarakat.

PNPM Mandiri pada tahun 2007 dikembangkan berdasarkan dua program pemberdayaan masyarakat yang cukup besar yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan mencakup Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk penanganan daerah tertinggal, pasca bencana dan konflik; Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW); dan Program Infrastruktur Perdesaan (PIIP) untuk mempercepat pengembangan infrastruktur wilayah dan perdesaan. Ke depan PNPM Mandiri juga diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh departemen/sektor dan pemerintah daerah.

Pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat tersebut memerlukan target dan indikator harus dicapai selama kurun waktu pelaksanaan program. Untuk itu, diperlukan pemantauan dan evaluasi yang secara khusus melihat perkembangan pencapaian target dan indikator PNPM Mandiri secara konsisten dan terbuka. Pemantauan yang memadai terhadap kinerja program diperlukan agar dapat dilakukan evaluasi yang mendorong pengelolaan program yang lebih efektif dan sesuai dengan tujuan PNPM Mandiri.



PNPM Mandiri dengan formulasi koordinasi dan konsolidasinya tidak akan mungkin terlepas dari berbagai kekurangan. Untuk itu, pemantauan dan tindak lanjut dari hasil-hasil evaluasi sangat besar perannya dalam menyempurnakan formulasi program sehingga masyarakat miskin yang berdaya layak untuk dapat diwujudkan.

Agar semua program yang tergabung dalam PNPM Mandiri dapat melakukan pemantauan dan evaluasi yang menggunakan kriteria dan metodologi yang relatif sama, maka disusun Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PNPM Mandiri ini. Pedoman ini berfungsi sebagai panduan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan PNPM Mandiri kepada para pemangku kepentingan dari berbagai program, termasuk di dalamnya: pemerintah, konsultan, fasilitator, dan kelompok masyarakat.



Tujuan Pemantauan dan Evaluasi PNPM Mandiri, yaitu:

- Memastikan **konsistensi** antara kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri.
- Menyusun **indikator kinerja** PNPM Mandiri yang menjadi acuan bagi setiap program sektor.



Apa itu Pemantauan dan Evaluasi?

Pemantauan adalah pengumpulan data secara berkala dan tepat waktu untuk menentukan apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pemantauan merupakan proses yang berjalan terus menerus selama siklus proyek, dari pelatihan dan sosialisasi, hingga perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Hasil pemantauan digunakan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan dan menyesuaikan perencanaan.

Evaluasi adalah menilai secara berkala apa yang telah dihasilkan, untuk mengetahui apakah proyek berhasil mencapai tujuan-tujuan utamanya.

- Memastikan target makro penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dapat diterjemahkan dan diakomodasikan dalam **target-target mikro/teknis** setiap program sektor.
- Mewujudkan **kepemilikan kolektif** publik terhadap program yang dicerminkan melalui kepedulian publik di dalam memantau pengelolaan program secara luas dan konsisten.
- Memastikan **respon dan umpan balik** pengelola program terhadap pengaduan dan saran publik dilakukan secara cepat dan tepat.
- Mendorong **tercapainya tolok ukur kinerja program** yang secara kolektif mencapai sasaran nasional dalam penanggulangan kemiskinan.

2.1. MENGAPA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PNPM MANDIRI PENTING?

- Pemantauan penting karena memungkinkan para pemangku kepentingan dari program sektor **mengetahui kemajuan yang telah**



dicapai. Adanya sistem pemantauan kegiatan/proyek¹ memungkinkan pemantauan status pelaksanaan proyek secara terus menerus dan identifikasi permasalahan yang mungkin timbul. Secara keseluruhan hasil pemantauan dapat menunjukkan apakah proyek telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau tidak.

- Pemantauan dan evaluasi adalah alat pengelolaan yang berguna untuk pengambilan keputusan dan memastikan bahwa **tindakan perbaikan** dapat segera diambil secara cepat dan tepat.
- Pemantauan dan evaluasi penting karena **merekam pengalaman proyek dan pelajaran yang dapat dipetik.** Pemantauan dan evaluasi memungkinkan pengelola proyek dan pihak-pihak lain mengetahui apa yang terjadi di lapangan.

Dari pengalaman PNPM Mandiri, para pemangku kepentingan proyek dapat mengetahui bukan sebatas apa yang dapat terlaksana dan apa yang tidak dapat dilaksanakan, namun juga situasi dan kondisi apa yang memungkinkan proyek dapat terlaksana, berbagai inisiatif dalam memperlancar dan mengefektifkan proyek, usulan-usulan dan kearifan lokal yang patut ditiru terkait dengan proses pembangunan berbasis masyarakat dan pemberantasan kemiskinan.

2.2. PRINSIP-PRINSIP PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- **Berorientasi Peningkatan Mutu.** Pemantauan dan evaluasi harus dilihat sebagai perangkat pengelolaan yang berguna untuk peningkatan mutu PNPM Mandiri. Jika pemantauan dan evaluasi berjalan dengan baik, banyak pihak akan memperoleh manfaat, karena dengan demikian akan tersedia berbagai informasi untuk peningkatan mutu pengelolaan program selanjutnya. Pemantauan dan evaluasi hendaknya dilihat sebagai bagian dari proses belajar yang berjalan secara terus menerus.

¹ terminologi kegiatan yang umum dipergunakan dalam pemerintahan selanjutnya di beberapa bagian disebut dengan istilah proyek agar memudahkan pemahaman bagi seluruh pengguna pedoman ini (pemerintah dan non pemerintahan/ umum).



- **Partisipasi dan Transparansi/Akuntabilitas.** Merupakan dua prinsip utama dalam pengelolaan PNPM Mandiri secara keseluruhan yang juga menjadi prinsip dalam proses pemantauan dan evaluasi.

Semua pihak yang berkepentingan dengan PNPM Mandiri harus merasa bebas untuk melibatkan diri dan melapor jika ada permasalahan yang ditemukan dalam program dan proyek serta turut memberikan sumbangan pikiran untuk peningkatan mutu proyek.

Pemantauan dan evaluasi sebaiknya dilakukan dalam lingkungan yang mendorong keterbukaan dan dapat menerima dengan tangan terbuka berita baik dan buruk, pujian maupun kritikan.

Hendaknya tidak ada rasa takut di pihak warga untuk melapor jika ada permasalahan yang ditemui. Hal yang penting di sini adalah para pelaksana proyek hendaknya menilai persoalan atau masalah itu secara obyektif dan segera mengambil langkah perbaikan jika diperlukan.

Pemantauan dilakukan berbagai pihak (pemerintah dan konsultan selaku pengelola program, masyarakat, serta kelompok peduli) secara aktif di semua tingkatan/level (pusat/nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, sampai dengan tingkat masyarakat),

Pemantauan dari semua pihak dan level terhadap program/proyek akan menjadi salah satu tolok ukur tinggi rendahnya kepemilikan masyarakat terhadap program/proyek.

Perlunya upaya dari pengelola program untuk menggalang keaktifan masyarakat dalam memantau pengelolaan program dan pelaksanaan proyek, yang didukung dengan adanya transparansi informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak termasuk masyarakat luas.

Pengelola program juga perlu menyampaikan informasi tentang hasil tindak lanjut yang telah dilakukan dari permasalahan yang diajukan oleh berbagai pihak.



- **Akurasi Informasi.** Semua pihak yang berkepentingan dengan PNPM Mandiri hendaknya berupaya memberikan informasi seakurat mungkin. Tidak ada informasi yang ditutup-tutupi dan tidak pula melaporkan apa yang menurutnya enak didengar oleh pihak lain.

Jika memungkinkan, informasi perlu diuji silang (*crosscheck*) dengan sumber-sumber lain untuk memastikan dapat tidaknya informasi tersebut dipercaya. Hanya informasi yang akurat, berdasarkan fakta dan sumber-sumber terpercaya, yang dapat membantu meningkatkan mutu PNPM Mandiri.

- **Kapastian Tindak Lanjut.** Salah satu yang menyebabkan keengganan pihak-pihak dalam memonitor dan mengadukan berbagai permasalahan program dan proyek adalah tidak adanya kepastian dari tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Rasa frustrasi berbagai pihak ini akan menyebabkan ketidakacuhan terhadap segala yang terjadi di dalam pengelolaan program/proyek

Untuk selanjutnya demi menjamin rasa kepemilikan berbagai pihak, baik yang terkait langsung dengan program/proyek maupun yang tidak, diperlukan kepastian tindak lanjut yang dilakukan oleh pengelola program/proyek atau pihak lain yang diatur dalam desain program.

Hasil tindak lanjut ini juga perlu diinformasikan kepada pengadu secara khusus, maupun khalayak secara luas, setidaknya sebagai bahan pelajaran untuk mengantisipasi terjadinya kasus-kasus serupa.



Pada umumnya, semua pihak yang berkepentingan dengan PNPM Mandiri bertanggung jawab memantau kegiatan sesuai dengan koridor wilayah tugasnya masing-masing dan memastikan bahwa kemajuan kegiatan sesuai dengan rencana dan penjadwalan dalam rangka pencapaian sasaran,

Secara rinci peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan dalam pemantauan dan evaluasi PNPM Mandiri dapat dijelaskan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Distribusi Peran Para Pihak dalam Pemantauan dan Evaluasi
PNPM Mandiri

3.1. Peran Lembaga Pemerintah

Unit Organisasi	Peran dan Tanggung Jawab
Tingkat Pusat/Nasional	
Tim Pengendali (TP) PNPM Mandiri. • Penanggung jawab koordinasi monitoring dan evaluasi PNPM Mandiri adalah Bappenas	<ul style="list-style-type: none">• Menyusun pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi PNPM Mandiri.• Memantau pelaksanaan PNPM Mandiri. Tim Pelaksana menyampaikan laporan kemajuan kepada Tim Pengarah paling tidak tiga bulan sekali.• Merumuskan berbagai masukan dalam pelaksanaan proyek untuk perbaikan program dan keberlanjutannya. Selanjutnya usulan perbaikan dari berbagai sumber ini akan dibahas dalam rapat TP-PNPM Mandiri.• Menindaklanjuti berbagai penyesuaian program yang dianggap perlu dilakukan pada saat program sedang berjalan.• Mengembangkan sistem pengelolaan informasi untuk mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PNPM Mandiri.• Menyampaikan laporan kemajuan kepada Pemerintah dan DPR
Pengelola program di masing-masing kementerian/lembaga	<ul style="list-style-type: none">• Menyusun tolok ukur program sektor sebagai turunan dan kedetailan dari tolok ukur kinerja PNPM Mandiri.• Membangun sistem pemantauan dan evaluasi proyek dengan mengacu pada Pedoman Pemantauan dan Evaluasi PNPM Mandiri.• Memantau seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi proyek.



	<ul style="list-style-type: none"> • Pengujian silang (<i>crosscheck</i>) pemantauan yang dilakukan oleh konsultan di lapangan bila diperlukan. • Memastikan berjalannya mekanisme penanganan masalah yang sudah diarahkan oleh PNPM Mandiri untuk dapat berjalan dan diikuti mulai dari level kecamatan hingga pusat. • Menjalankan sistem pengelolaan informasi yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan informasi PNPM Mandiri. • Mempersiapkan laporan reguler dan periodik proyek dan program, baik fisik maupun keuangan.
Tingkat Provinsi	
<p>Tim Koordinasi PNPM Mandiri Provinsi (<i>merupakan bagian dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah/TKPKD Provinsi</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri pada skala provinsi. • Menyampaikan laporan kemajuan kegiatan dan keuangan, hasil evaluasi program, serta hasil audit kepada Gubernur dan kepada TP PNPM Mandiri. • Membentuk Unit Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM) yang merupakan unit gabungan dari berbagai unsur: wakil program seluruh sektor (konsultan manajemen wilayah) dan Muspida (dinas, badan, lembaga, kantor terkait, aparat pengawas fungsional, dan aparat penegak hukum di wilayah provinsi). • Bersama Unit PPM : memantau, memproses, dan memecahkan masalah yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan menjatuhkan penalti/sanksi sesuai pedoman dan aturan yang berlaku. • Memastikan bahwa PNPM Mandiri di wilayahnya dilaksanakan sesuai dengan Pedoman PNPM Mandiri dan bila perlu diadakan pertemuan berbagai pihak penanggung jawab program sektor di provinsi untuk pemecahannya ataupun mengkonsultasikan dengan TP PNPM Mandiri.
Tingkat Kabupaten/Kota	
<p>Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten/Kota (<i>merupakan bagian dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah/TKPKD Kabupaten/Kota</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri pada skala kabupaten/kota. • Menyampaikan laporan kemajuan kegiatan dan keuangan, hasil evaluasi program, serta hasil pemeriksa (BPK) kepada Bupati/Walikota dan TP PNPM Mandiri. • Membentuk Unit Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM) yang merupakan unit gabungan dari berbagai unsur: wakil program seluruh sektor (konsultan manajemen wilayah) dan



	<p>Muspida (dinas, badan, lembaga, kantor terkait, aparat pengawas fungsional, dan aparat penegak hukum di wilayah kabupaten/kota).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bersama Unit PPM : memantau, memproses, dan memecahkan masalah yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan menjatuhkan penalti/sanksi sesuai pedoman dan aturan yang berlaku. • Memastikan bahwa PNPM Mandiri di wilayahnya dilaksanakan sesuai dengan Pedoman PNPM Mandiri dan bila perlu diadakan pertemuan berbagai pihak penanggung jawab program sektor di kabupaten/kota untuk pemecahannya ataupun mengkonsultasikan dengan Tim Koordinasi PNPM Mandiri Provinsi atau TP PNPM Mandiri.
Tingkat Kecamatan	
<ul style="list-style-type: none"> • Camat • Pejabat Operasional Kegiatan (PJOK) 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri pada skala kecamatan. • Menyampaikan laporan kemajuan kegiatan dan keuangan serta hasil evaluasi program kepada Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten/Kota. • Membentuk Satuan Khusus Penanganan Masalah (SKPM) yang merupakan unit gabungan dari berbagai unsur: camat, PJOK, fasilitator program sektor (pemberdayaan dan teknis), representasi masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama, dll) dan anggota Muspika lainnya. • Bersama SKPM : memantau, memproses, dan memecahkan masalah yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan menjatuhkan penalti/sanksi sesuai pedoman dan aturan yang berlaku. • Memastikan bahwa PNPM Mandiri di wilayahnya dilaksanakan sesuai dengan Pedoman PNPM Mandiri dan bila perlu diadakan pertemuan berbagai pihak penanggung jawab program sektor di kabupaten/kota untuk pemecahannya ataupun mengkonsultasikan dengan Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten/Kota.
Tingkat Desa/Kelurahan	
Kepala Desa/Lurah	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau pelaksanaan program di tingkat desa/kelurahan. • Menyampaikan kepada SKPM di kecamatannya bila ada permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan proyek. • Membantu masyarakat dalam memahami dan melaksanakan program dan proyek sesuai Pedoman PNPM Mandiri.



3.1. PERAN KONSULTAN/FASILITATOR

Unit Organisasi	Peran dan Tanggung Jawab
Konsultan Pengelola Nasional (KMN)/ <i>National Management Consultant (NMC)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun indikator kinerja program sektor yang merupakan turunan dari indikator PNPM Mandiri dan merupakan kesepakatan antara kementerian/ lembaga penanggung jawab program dengan kerjasama donor. • Menyusun standar mutu bagi kegiatan/proyek, terutama untuk kegiatan fisik/infrastruktur. • Mensosialisasikan keseluruhan indikator kinerja program kepada jaringan konsultan di wilayah kerjanya. • Memantau pelaksanaan program sektor dan kegiatan di seluruh wilayah program sektor dan memberikan dukungan teknis maupun non teknis jika diperlukan. • Mempersiapkan laporan kemajuan program dan kegiatan sektor serta keuangannya secara bulanan, kuartal, dan tahunan dan menyampaikannya kepada penanggung jawab program sektor. • Mengembangkan MIS program sektor yang mengacu kepada MIS PNPM Mandiri. • Memastikan terbentuk dan berjalannya sistem pemantauan dan evaluasi PNPM Mandiri secara nasional yang efektif sesuai wilayah program sektornya masing-masing.
Konsultan Pengelola Wilayah Provinsi (KMW Prop.)	<ul style="list-style-type: none"> • Mensosialisasikan keseluruhan indikator kinerja program kepada jaringan konsultan di wilayah kerjanya. • Memantau pelaksanaan program sektor dan kegiatan di seluruh wilayah program sektor dan memberikan dukungan teknis maupun non teknis jika diperlukan. • Mempersiapkan laporan kemajuan program dan kegiatan sektor serta keuangannya secara bulanan, kuartal, dan tahunan dan menyampaikannya kepada Konsultan Manajemen Pusat. • Mendukung terlaksananya MIS program sektor. • Memastikan terbentuk dan berjalannya sistem pemantauan dan evaluasi PNPM Mandiri di provinsi dan kabupaten/kota yang efektif dan menjadi bagian dari UPPM sesuai wilayah program sektornya masing-masing.



<p>Konsultan Pengelola Kabupaten/Kota (KMW Kab/Kota)</p>	<ul style="list-style-type: none">• Mensosialisasikan keseluruhan indikator kinerja program kepada jaringan fasilitator di wilayah kerjanya.• Memantau pekerjaan fasilitator pemberdayaan di seluruh wilayah program sektor dan memberikan dukungan teknis maupun non teknis jika diperlukan. <i>Fasilitator Teknis pada tingkat kabupaten/kota berperan secara khusus dalam memastikan mutu pekerjaan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan Konsultan Manajemen Pusat.</i>• Mempersiapkan laporan kemajuan program dan kegiatan sektor serta keuangannya secara bulanan, kuartal, dan tahunan dan menyampaikannya kepada Konsultan Manajemen Provinsi dan Pusat.• Mendukung terlaksananya MIS program sektor.• Memastikan terbentuk dan berjalannya sistem pemantauan dan evaluasi PNPM Mandiri di kabupaten/kotanya yang efektif dan menjadi bagian dari UPPM sesuai wilayah program sektornya masing-masing.
<p>Fasilitator Kecamatan</p>	<ul style="list-style-type: none">• Memantau proses perencanaan bersama dan kemajuan proyek di kecamatan masing-masing dan menyusun laporannya secara bulanan.• Memantau dan memastikan partisipasi masyarakat miskin dan lainnya² secara aktif serta turut sertanya dalam pengambilan keputusan.• Menyampaikan laporannya kepada KMW Kabupaten/Kota.• Membantu camat dalam pembentukan SKPM dan menjadi bagian dari satuan tersebut.• Memantau fasilitator desa dan memberi dukungan bila diperlukan. Hal ini terutama bila terjadi konflik/permasalahan yang disebabkan karena kesimpangsiuran informasi.

² selain masyarakat miskin, ada beberapa kelompok yang musti dilibatkan dalam pengelolaan proyek, yakni: kelompok perempuan, kelompok rentan, dan warga yang terpinggirkan/tersisihkan.



3.2. PERAN MASYARAKAT SIPIL/ KELOMPOK PEDULI DAN KELOMPOK MASYARAKAT

Unit Organisasi	Peran dan Tanggung Jawab
LSM (lembaga independen non pemerintah)	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau program sektor secara independen dan memberikan usulan/masukan sesuai dengan skala wilayah program sektornya masing-masing kepada tim koordinasi program.
Fasilitator Desa/Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau dan memastikan bahwa proyek dijalankan sesuai dengan rencana yang telah disusun bersama dengan keterlibatan aktif masyarakat (miskin dan kelompok lainnya) serta keikutsertaannya secara langsung dalam pelaksanaan proyek. • Menyiapkan laporan kemajuan bulanan desa dan menyampaikannya kepada fasilitator kecamatan.
• Kelompok Masyarakat Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Pokmas Pelaksana: memantau pelaksanaan proyek/sub proyek yang dikelolanya dan menyusun laporannya.
• Kelompok Masyarakat Peduli/ Pemantau	<ul style="list-style-type: none"> • Pokmas Peduli: memantau pelaksanaan proyek dan memberikan dukungan <i>materiil</i> dan <i>immateriil</i> dengan akuntabilitas yang jelas, tertulis, dan dilaporkan.
• Warga Masyarakat secara luas	<ul style="list-style-type: none"> • Warga masyarakat: selain aktif dalam pengerjaan proyek juga melakukan pemantauan dari mulai proses perencanaan yang partisipatif hingga pelaksanaannya yang sesuai rencana bersama. Bila terjadi permasalahan ataupun penyimpangan dapat disampaikan kepada SKPM di masing-masing kecamatan.

Pemantauan dan evaluasi PNPM Mandiri yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di setiap tingkat pemerintahan hingga masyarakat perlu diatur dalam suatu mekanisme yang terkait. Keterkaitan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara reguler maupun berkala diharapkan akan memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai pelaksanaan PNPM Mandiri dan dampak-dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan.

Secara garis besar, alur kerja pemantauan dan evaluasi PNPM Mandiri yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan keterkaitannya tergambar pada Diagram 1. Sedangkan alur kerja pemantauan dan



evaluasi reguler oleh konsultan di masing-masing program PNPM Mandiri sebagaimana digambarkan pada Diagram 2.

Diagram 1
Alur Kerja Pemantauan dan Evaluasi PNPM Mandiri

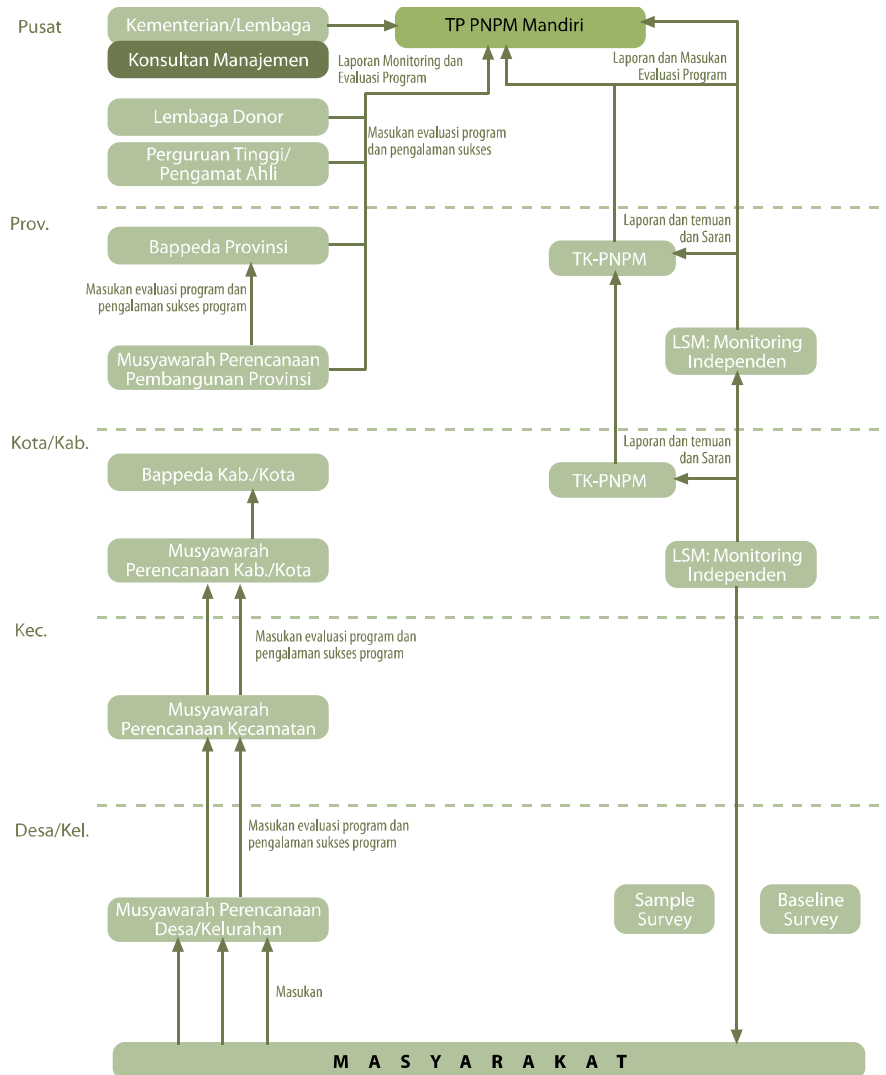
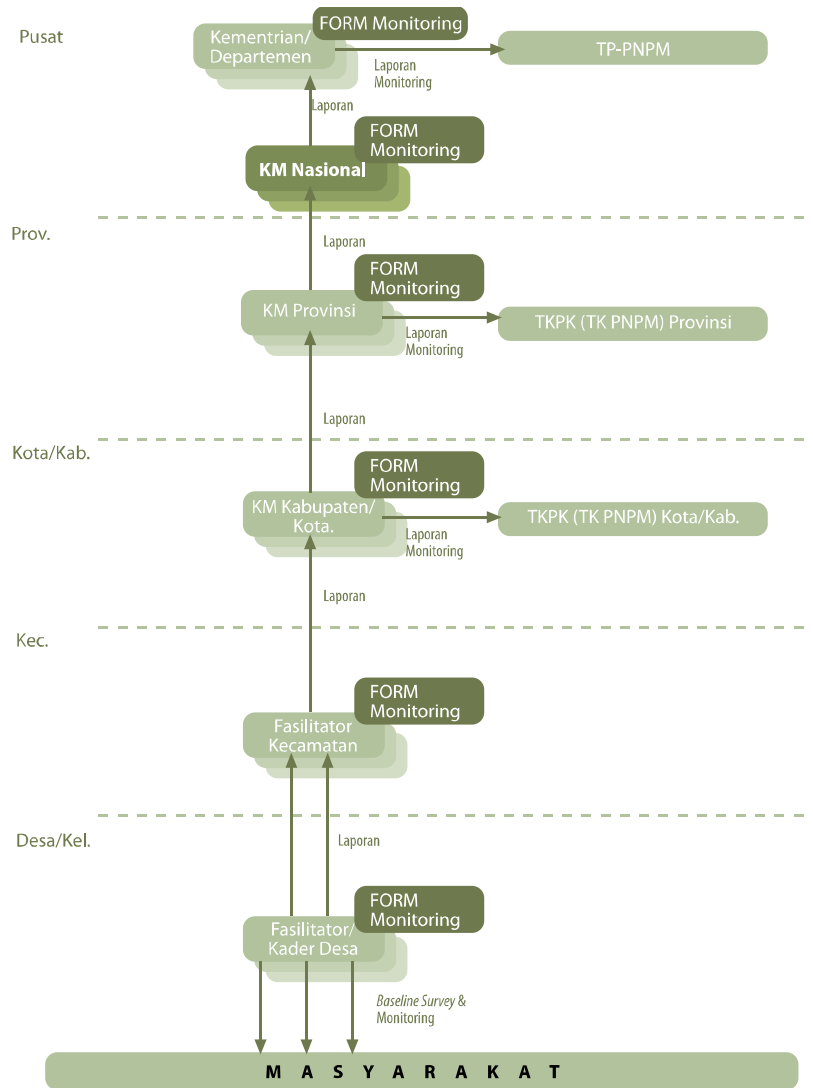




Diagram 2
Alur Kerja Pemantauan dan Evaluasi PNPM Mandiri
oleh Konsultan Program Sektor





BAGIAN 4 CAKUPAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PNPM Mandiri memiliki tujuan umum, sasaran dan *output*/keluaran yang ditargetkan tercapai setiap tahunnya. Berdasarkan tujuan dan keluaran program yang ingin dicapai, selanjutnya disusun indikator kinerja program yang akan menjadi alat ukur dari pencapaian program selama kurun waktu satu tahun.

Pengisian seluruh tolok ukur kinerja program menjadi salah satu bahan laporan bulanan, kuartalan, dan tahunan yang menjadi tugas para pihak secara berjenjang (seperti dijelaskan pada tabel 1).

Selain melalui sistem pelaporan berjenjang, pengukuran kinerja program dan proyek dapat pula dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi lainnya, seperti: studi kasus, survei, evaluasi sektor, misi supervisi, dan lain sebagainya.

Keberadaan Sistem Pengelolaan Informasi (*Management Information System/ MIS*) juga berperan penting dalam membantu 'merekam' informasi-informasi penting mengenai hasil capaian PNPM Mandiri secara *realtime* (terkini) dari waktu ke waktu.

Untuk proses evaluasinya akan dilihat secara berkala setelah hasil pemantauan diterima. Evaluasi terhadap ketercapaian sasaran akan menjadi masukan penting untuk meningkatkan kinerja program ke depan, seperti halnya peninjauan kembali penyebab dari ketidaktercapaian sasaran program.

Secara umum cakupan/ruang lingkup pemantauan dan evaluasi meliputi :

- 1. Ruang lingkup substansi (tahapan) program.** Meliputi: penyusunan dan penetapan panduan, penyusunan dan penetapan tolok ukur program, sosialisasi panduan, perumusan dan penetapan kegiatan secara partisipatif, penetapan anggaran dan pendanaannya, penyaluran dana dan pengelolaannya, pelaksanaan proyek dan pembiayaannya, pencapaian target kegiatan, dan tindak lanjut pengaduan.
- 2. Ruang lingkup program.** Setiap tahun jumlah program yang



tergabung dalam PNPM Mandiri diharapkan semakin meningkat. Ruang lingkup program yang pada tahun 2007 hanya mencakup PPK (PNPM Perdesaan) dan P2KP (PNPM Perkotaan), pada tahun 2008 telah mencakup program pemberdayaan lainnya. Pada tahun 2009, berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sektoral secara bertahap juga akan bergabung ke dalam mekanisme PNPM Mandiri.

3. Ruang lingkup jangkauan wilayah. Orientasi pelaksanaan PNPM Mandiri adalah sedekat mungkin dengan masyarakat penerima manfaat. Untuk TA 2007 jangkauan wilayah (*lokus*) program pada tingkat kecamatan, sedangkan pada TA 2008 ruang lingkup jangkauan wilayah tersebut difokuskan hingga desa/kelurahan tertinggal. Pada tahun 2009, seluruh kecamatan akan menjadi lokasi PNPM Mandiri.

Terkait dengan cakupan/ruang lingkup tersebut maka pemantauan dan evaluasi yang dilakukan para pihak mencakup setiap substansi/tahapan program, jenis programnya, dan jangkauan wilayah program sesuai dengan peran masing-masing pihak.

4.1. TOLOK UKUR PROGRAM PNPM MANDIRI

Merupakan perangkat pengukuran sejauh mana **pemberdayaan masyarakat** telah menjadi bagian dari seluruh proses pengelolaan program, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Berbagai rangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut pada akhirnya bermuara pada tujuan umum program yaitu mempercepat pengurangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja.

Dengan tujuan umum tersebut, tolok ukur program secara umum adalah:

1. Keterlibatan masyarakat miskin, kelompok perempuan, kelompok rentan, dan kelompok terpinggirkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan kegiatan/proyek semakin besar.
2. Keberadaan kelompok masyarakat (pokmas) yang dipercaya oleh masyarakat dan akuntabel semakin meningkat yang ditunjukkan



- dari peningkatan kesertaan masyarakat miskin dalam Pokmas.
3. Peningkatan komposisi anggaran daerah untuk program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.
 4. Peningkatan jumlah dan kualitas kebijakan daerah yang pro rakyat miskin.
 5. Peningkatan kinerja pelayanan pemerintah daerah di sektor publik.
 6. Peningkatan kemampuan Pemda dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi lokal.
 7. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, sanitasi dan air bersih).
 8. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam akses informasi (terutama permodalan dan pasar).
 9. Peningkatan kemauan dan kemampuan para pelaku (terutama pemerintah daerah) dalam memberikan akses informasi (terutama permodalan dan pasar).
 10. Peningkatan kesadaran masyarakat miskin dalam pemeliharaan infrastruktur dasar.
 11. Peningkatan kesadaran dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan.
 12. Peningkatan anggaran Pemda untuk pelestarian lingkungan.

4.2. TOLOK UKUR PROGRAM SEKTOR

Merupakan perangkat pengukuran sejauh mana **dukungan sektor** dalam peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat, terutama masyarakat miskin, kelompok perempuan, kelompok marjinal (terpinggirkan/tersisih), dan kelompok rentan.

Dukungan sektor yang berupa berbagai kegiatan/keproyekan fisik dan non fisik yang berimplikasi langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat.

Tolok ukur sektor secara umum adalah sebagai berikut:



1. Keterlibatan penduduk miskin, perempuan, dan kelompok marjinal dalam proyek padat karya semakin besar.
2. Penurunan jumlah penganggur dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan program.
3. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin dalam kurun waktu satu tahun.
4. Adanya peraturan keuangan mikro yang *pro poor* dan mudah diterapkan.
5. Peningkatan lembaga kredit mikro yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat miskin dan peningkatan antusiasme masyarakat miskin untuk mengaksesnya.
6. Menurunnya kemauan masyarakat miskin untuk mengakses dana pinjaman rentenir.
7. Peningkatan jumlah usaha baru dari masyarakat miskin yang dapat dikembangkan melalui program.
8. Peningkatan produktifitas usaha baru dari masyarakat miskin yang dapat dikembangkan melalui program.
9. Peningkatan tenaga kerja yang dilibatkan dalam usaha baru dari masyarakat miskin yang dapat dikembangkan melalui program.
10. Peningkatan kemampuan masyarakat miskin dalam pengelolaan ekonomi produktif.
11. Meningkatnya keterhubungan faktor produksi dan pasar.
12. Peningkatan kemampuan masyarakat miskin dalam mengkonsumsi barang, terutama kebutuhan pangan.
13. Peningkatan kualitas ibu hamil, menyusui, dan anak.
14. Penurunan kematian ibu hamil, bayi, dan balita.
15. Peningkatan supply air bersih dan penggunaan air bersih oleh masyarakat.
16. Peningkatan partisipasi anak dalam pendidikan dasar dan menengah.
17. Peningkatan sanitasi lingkungan permukiman kelompok masyarakat miskin.



18. Penurunan waktu tempuh untuk mengakses sarana dan prasarana pelayanan dasar (efisiensi).
19. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar untuk masyarakat, terutama untuk masyarakat miskin.

4.3. TOLOK UKUR KEPUASAN PENERIMA MANFAAT (*BENEFICIARIES*)

Merupakan perangkat pengukuran sejauh mana **tingkat kepuasan** warga miskin kelompok sasaran dalam menilai keseluruhan aspek pengelolaan PNPM Mandiri.

Penilaian warga ini dapat dilakukan dengan metode *sampling* yang metodologinya dapat dipertanggungjawabkan.

Tolok ukur kepuasan penerima manfaat secara umum adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kepuasan masyarakat miskin terhadap pelayanan pemerintah daerah dengan adanya PNPM Mandiri, terutama untuk pelayanan dasar.
2. Tingkat kepuasan masyarakat dalam keterlibatannya pada proses penetapan proyek dalam PNPM Mandiri.
3. Tingkat kepuasan warga dengan kinerja pokmas yang menyalurkan dana untuk mereka.
4. Tingkat kepuasan pokmas dan warga dengan prosedur penyaluran dana yang diberlakukan PNPM Mandiri.
5. Tingkat kepuasan warga terhadap hasil dari proyek-proyek pembangunan yang dijalankan bersama (pemerintah dan masyarakat) dari PNPM Mandiri.
6. Penilaian warga terhadap perbaikan tingkat kesejahteraannya (kesehatan, ekonomi dan konsumsi rumah tangga, dll) dengan adanya PNPM Mandiri
7. Tingkat kepuasan warga terhadap pola kredit yang diberlakukan oleh unit pelaksana kredit atas bantuan PNPM Mandiri.



Nilai masing-masing tolok ukur akan dijabarkan dalam tabulasi indikator kinerja program. Indikator ini dikumpulkan dan didata oleh para pelaku dari pelaksanaan di lapangan untuk kurun waktu satu tahun (tahunan), pencapaian sampai dengan 2009 (tiga tahun pelaksanaan), dan pencapaian sampai dengan tahun 2015 (sembilan tahun pelaksanaan).

Keseluruhan tolok ukur ini dapat bertambah sewaktu-waktu untuk penyempurnaan PNPM Mandiri selanjutnya. Indikator kinerja akan ditetapkan serealistis mungkin dengan mengakomodasikan kesanggupan masing-masing sektor untuk mewujudkannya.

Kontribusi sektor dalam pencapaian target PNPM Mandiri akan ditetapkan dan sekaligus menjadi tolok ukur dari kontribusi setiap sektor dalam penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat secara nasional.

Sehubungan pilihan kegiatan/proyek menjadi keputusan mutlak dari warga masyarakat setempat, maka untuk penetapan tolok ukur sektor akan didasarkan pada kecenderungan pencapaian program sektor yang telah dilakukan selama ini (pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya). Untuk program-program sektor yang baru dimulai (TA 2008), akan dilakukan penilaian oleh masing-masing sektor terkait dalam menetapkan tolok ukur sektor yang sesuai dengan kontribusinya bagi PNPM Mandiri.

Berbagai indikator di atas beserta tujuan, keluaran, sumber data, dan penjelasan terkait lainnya dituangkan dalam Kerangka Logis PNPM Mandiri pada Lampiran A. Dari berbagai indikator yang diperlukan untuk menggambarkan perkembangan dan dampak PNPM Mandiri terdapat indikator inti yang harus dipantau oleh semua program PNPM Mandiri. Ringkasan indikator inti ini dapat dilihat pada Lampiran B. Mengingat sebagian indikator tersebut bersifat kualitatif, maka Lampiran C memberikan panduan pertanyaan-pertanyaan yang dapat digunakan pada saat pemantauan. Berbagai acuan yang tertuang dalam pedoman ini diharapkan dapat memudahkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program-program PNPM Mandiri.



Pemantauan umumnya lebih diorientasikan untuk masukan program. Tujuan pemantauan adalah mengetahui apakah program berjalan sesuai dengan rencana dan apakah ada hal-hal yang perlu disesuaikan untuk perbaikan program. Pemantauan secara teratur juga penting untuk mengetahui apakah program dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan tata aturannya. Hal ini mencakup pemantauan apakah prinsip tata pemerintahan, prinsip pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, mutu teknis pekerjaan, penggunaan dana, dan kepatuhan pada tata aturan lingkungan hidup dan sosial sudah diikuti.

PNPM akan menggunakan berbagai bentuk pemantauan:

5.1. PEMANTAUAN DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pemantauan oleh Masyarakat melibatkan kelompok dan warga masyarakat secara luas dalam pengawasan dan pemantauan kegiatan/program. Dalam PNPM Mandiri, ada kelompok masyarakat yang dipilih atau ditugaskan untuk mengawasi berbagai tahapan program: apakah itu perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, tata buku, atau operasi dan perawatan. Agar dapat berjalan efektif, diperlukan beberapa kegiatan tertentu dalam pemantauan ini:

- **Kemudahan memperoleh informasi (keterbukaan).** Keterbukaan informasi proyek sehingga warga masyarakat dapat memperoleh dengan mudah dan dapat melakukan pemeriksaan dan pengujian atas kebenarannya. Keterbukaan informasi sangatlah penting dan dilakukan oleh pengelola program atau proyek dengan cara-cara yang aktif, seperti pengumuman terhadap kegiatan dan alokasi anggarannya yang terpampang di papan pengumuman yang diketahui lokasinya oleh khlayak dan juga di lokasi proyek.
- **Sosialisasi dan ajakan secara terbuka (inklusif).** Hal ini diperlukan agar warga masyarakat yang barangkali selama ini pasif dan tidak peduli terhadap pembangunan lingkungannya untuk kembali bergerak berkontribusi, setidaknya dalam pemantaun kegiatan. Jangan sampai ada kesan bahwa kegiatan pemerintah ini (PNPM



Mandiri) tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah lainnya yang selalu dinilai minor.

- **Rapat Umum Terbuka.** Sebagai bagian dari prinsip-prinsip PNPM Mandiri, yakni partisipasi masyarakat dan keterbukaan serta akuntabilitas, semua rapat proyek hendaknya terbuka untuk umum dan warga masyarakat hendaknya diizinkan untuk dapat hadir dan memantau pelaksanaan pertemuan. Selama pelaksanaan proyek, proyek juga hendaknya mengadakan rapat pertanggungjawaban untuk melaporkan kemajuan proyek dan keuangan proyek secara terbuka.
- **Menampung keluhan dan menyelesaikan pengaduan.** Semua program sektor di bawah koordinasi PNPM Mandiri perlu memiliki unit pengaduan (UPPM) yang memungkinkan warga masyarakat dan masyarakat luas menyampaikan keluhan atau meminta penjelasan. Informasi mengenai saluran yang digunakan untuk menampung keluhan dapat melalui berbagai cara, seperti: surat atau Kotak Pos (*PO Box*), SMS, atau adanya personal penanggung jawab yang dapat dihubungi, serta keberadaan fasilitator yang sedia setiap saat untuk menindaklanjuti pengaduan/keluhan masyarakat. Saluran-saluran tersebut hendaknya diinformasikan secara luas kepada khalayak (*dilihat kembali distribusi tabel 1. distribusi peran para pihak dalam pemantauan dan evaluasi PNPM Mandiri*).
- **Kunjungan Lintas Desa dan Kecamatan.** PNPM Mandiri mendorong kelompok masyarakat dan anggotanya untuk saling belajar atas kesuksesan dan percepatan kemandirian yang dicapai wilayah lain. Hal itu pula yang melatarbelakangi perlunya adanya saling belajar antar desa atau kecamatan yang barangkali pelajaran-pelajaran penting dapat dipetik di wilayah yang tidak terlampau jauh dari domisilinya. Demikian juga dalam konteks evaluasi antar desa atau kecamatan yang dilatrbelakangi adanya keinginan berkompetisi menghasilkan capaian program yang terbaik.

Selain itu berbagi pengalaman sesama pengelola dan penerima manfaat program akan memunculkan hal-hal yang baik atau barangkali penyim-



pangan yang disadari atau tidak telah dilakukan, atau bahkan inisiatif dan inovasi yang berperan penting dalam percepatan kemandirian warga dan pencapaian target program.

5.2. PEMANTAUAN OLEH PEMERINTAH

PNPM Mandiri adalah program pemerintah. Dana PNPM Mandiri adalah dana milik warga masyarakat yang seyogyanya para pengelola di pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa program dapat berjalan sesuai dengan prinsip dan prosedurnya serta dana dimanfaatkan secara tepat bagi kesejahteraan warga.

Pemerintah di tingkat nasional, daerah, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan bertanggung jawab memantau pelaksanaan program dan proyek serta memastikan bahwa sasaran dapat tercapai dengan mematuhi prinsip-prinsip yang diberlakukan. Untuk itu pemerintah harus memeriksa dan memastikan untuk mengetahui apakah kegiatan proyek berjalan sesuai dengan rencana dan apakah prinsip dan prosedurnya diikuti. Secara berkala, akan diturunkan misi supervisi dan kunjungan lapangan oleh pejabat pemerintah serta unsur terkait lainnya (lembaga donor, konsultan, LSM, dan sebagainya) ke lokasi proyek. Mekanisme supervisi dan kunjungan lapangan antar program-program PNPM Mandiri perlu selaras agar tidak menimbulkan kebingungan atau hal-hal yang tidak bertanggungjawab pada pelaksanaan di lapangan.

5.3. PEMANTAUAN OLEH KONSULTAN DAN FASILITATOR

Kegiatan memantau proyek juga merupakan tanggung jawab konsultan proyek dan fasilitator di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Konsultan melakukan kunjungan secara berkala ke lokasi-lokasi proyek selama siklus proyek untuk memantau perkembangan keuangan dan memastikan kegiatan sesuai rencana masyarakat dan target program dan sekaligus menyampaikan laporan kinerja proyek secara bulanan, kuartal dan tahunan (*lihat kembali distribusi tabel 1. distribusi peran para pihak dalam pemantauan dan evaluasi PNPM Mandiri*).



Untuk menjamin adanya pengukuran yang jelas terhadap capaian PNPM Mandiri secara khusus, maka selanjutnya dilakukan survey dasar (*baseline survey*) yang akan menjadi titik tolak dari pemantauan dan evaluasi terhadap program yang akan dilakukan selanjutnya selama berjalannya program.

Survey dasar ini dapat dilakukan oleh masing-masing sektor dengan berpegangan kepada informasi kondisi saat ini dari tolok ukur yang telah ditetapkan program sektor bersama dengan PNPM Mandiri di wilayah-wilayah kerjanya secara nasional atau berdasarkan sampel.

5.4. SISTEM PENGELOLAAN INFORMASI (SPI)

Informasi program mengenai kemajuan, keluaran, dan hasil dimasukkan dan disusun dalam *Management Information System* (MIS) atau Sistem Pengelolaan Informasi (SPI) PNPM Mandiri berbasis komputer dan internet. SPI PNPM Mandiri terbuka untuk dimanfaatkan para pihak di tingkat kabupaten, provinsi, daerah, dan pusat. SPI menyediakan informasi mengenai proyek selengkap mungkin, diantaranya berisikan: lokasi proyek, status kegiatan proyek, besarnya investasi, staf pelaksana proyek, jadwal pelaksanaan proyek, status keuangan proyek, dan keluhan dan pengaduan. SPI PNPM Mandiri dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Bappenas. SPI ini terkoneksi dengan sistem informasi semua program yang tergabung dalam PNPM Mandiri dan program pembangunan lainnya.

MIS dikembangkan dengan prinsip: kelengkapan informasi, akurasi informasi, *realtime* (kemutahiran) informasi, kemudahan akses, dan efisiensi pendanaan. Untuk mengakomodir prinsip-prinsip tersebut perlu dikembangkan suatu sistem yang memungkinkan terjalannya (*networking*) *hardware* dan *software* (perangkat keras dan lunak) komputer antar daerah dan pusat/nasional. Aplikasi yang dipergunakanpun semudah mungkin bagi pengelola MIS dan dikembangkan oleh masing-masing sektor secara terintegrasi dengan PNPM Mandiri.

Semua program sektor di bawah koordinasi PNPM Mandiri harus mengembangkan, mengelola, dan merawat SPI secara efektif dan



berkelanjutan, sehingga memungkinkan kemajuan proyek terpantau secara berkala. Pedoman Pengelolaan Informasi PNPM Mandiri diterbitkan dalam dokumen tersendiri.

5.5. PEMANTAUAN OLEH LSM

PNPM Mandiri mendorong kelompok masyarakat sipil (LSM dan lembaga non pemerintah lainnya) untuk melakukan pemantauan secara independen terhadap pelaksanaan program agar berjalan sesuai yang diharapkan. Kelompok masyarakat sipil memainkan peran penting sebagai pemantau independen yang tidak berafiliasi dengan berbagai kepentingan. Kelompok masyarakat sipil juga dapat memainkan peran penting untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat, terutama kelompok marjinal, kelompok warga miskin, kelompok perempuan mendapat kesempatan untuk turut serta dalam pengelolaan PNPM Mandiri.

Untuk komponen proyek pada level desa/kelurahan, LSM yang berdomisili di provinsi seyogyanya melakukan kegiatan pemantauan ini termasuk dengan menggerakkan dan mengembangkan kapasitas kelompok masyarakat untuk melakukan pemantauan secara mandiri.

5.6. PEMERIKSAAN KEUANGAN

Unsur pemerintah yang berperan dalam pemeriksaan keuangan, seperti: BPK, BPKP, dan Bawasda bertanggung jawab memeriksa PNPM Mandiri setiap tahunnya. Bawasda sebagai unsur daerah melakukan kegiatan pemeriksaan keuangan sesuai wilayah kerjanya masing-masing, sedangkan BPK dan BPKP melakukan pengawasan secara keseluruhan, program skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Agar pemeriksaan dapat berjalan efektif, perlu disepakati indikator kinerja dan perkembangan pelaksanaan program dengan lembaga-lembaga pemeriksa tersebut.

Apabila diperlukan, pemeriksa publik dapat diminta untuk memeriksa keuangan program, terutama keuangan yang bersumber dari bantuan lembaga donor (*funding*). Hasil pemeriksaan keuangan ini perlu juga



dilaporkan kepada masyarakat dan juga disajikan dalam berbagai media publikasi program, seperti koran, website, dsb. Hasil pemeriksaan yang dipublikasikan merupakan hasil final yang sudah diuji silang dan ditanggapi oleh pengelola program/proyek.



Evaluasi difokuskan pada keluaran dan dampak proyek apakah sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi ini akan dilakukan pada pertengahan pelaksanaan PNPM Mandiri dan setelah keseluruhannya program selesai (tahunan).

Beberapa jenis evaluasi yang dapat dilakukan antara lain:

6.1. EVALUASI KELUARAN (*OUTPUT*)

Dilakukan untuk melihat sejauh mana perubahan kesejahteraan yang terjadi dengan membandingkan kondisi saat ini dari warga miskin dan kelompok sasaran lainnya dengan setelah berjalannya program (tahunan).

Dasar pengukuran dan evaluasi ini dari hasil survey dasar yang dilakukan oleh para konsultan program sektor.

Evaluasi ini dapat dilakukan berbagai pihak, baik penanggung jawab program maupun pihak-pihak lain secara independen.

Masukan evaluasi program dapat disampaikan kepada penanggung jawab program di wilayahnya masing-masing dan atau kepada PNPM Mandiri nasional.

6.2. EVALUASI DAMPAK (*IMPACT*)

PNPM Mandiri merencanakan beberapa evaluasi dampak dengan fokus utama pada dampak dalam kaitan dengan penanggulangan kemiskinan, perkembangan modal sosial, tata kelola pemerintahan (*good governance*), dan pengembangan kapasitas (pemberdayaan).

Untuk maksud tersebut dipergunakan metode campuran, baik menggunakan teknik kuantitatif maupun kualitatif. Sejumlah survei akan dilakukan untuk mengukur dampak program, dengan menggunakan survei rumah tangga, Susenas (survey sosial ekonomi nasional), dan studi kualitatif.



Keseluruhan survei ini menggunakan teknik perbedaan ganda dengan melihat : kondisi sebelum dan sesudah, wilayah perlakuan dan wilayah kontrol (dengan dan tanpa intervensi program).

6.3. STUDI KHUSUS/TEMATIK

Untuk mempertajam hasil pemantauan dan berbagai evaluasi reguler di atas, sejumlah studi tematik atau studi khusus dengan tema tertentu juga akan dilakukan selama kurun waktu mulai pelaksanaan program (2007) hingga beberapa tahun ke depan. Studi-studi tersebut mencakup antara lain sebagai berikut:

- **Kaji cepat prasarana fisik**, untuk mengevaluasi mutu infrastruktur yang dibangun dengan standar PNPM Mandiri.
- **Pengkajian operasional dan perawatan**, untuk mengevaluasi tata cara operasional dan perawatan infrastruktur dan mengevaluasi struktur ongkos yang dibayar pengguna dan kemampuan warga desa dan pemerintah setempat membiayai operasional dan perawatan tersebut.
- **Pengkajian dampak ekonomi dan tingkat pengembalian**, untuk mengukur tingkat pengembalian dan dampak ekonomi program-program PNPM Mandiri.
- **Pengkajian ulang gender**, untuk mengkaji ulang strategi program dan pelaksanaan program dari aspek kesetaraan gender.
- **Pengkajian pengembangan kredit mikro dan usaha masyarakat**, untuk mengevaluasi strategi kredit mikro dan pengembangan usaha di bawah PNPM Mandiri, guna mengetahui bagaimana komponen-komponen ini dapat ditingkatkan agar menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dan keberlanjutan.
- **Pengkajian perencanaan pembangunan**, mengevaluasi perencanaan mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga nasional dan bagaimana meningkatkan koordinasi antar berbagai tingkatan.
- **Pengkajian pengembangan kapasitas kelembagaan**. Pengem-



bangun kapasitas kelembagaan adalah salah satu komponen penting PNPM Mandiri. Komponen program ini memberikan berbagai pelatihan bagi warga desa/kelurahan, kelompok masyarakat pelaksana program, dan aparat pemerintah daerah setempat. Perkembangan komponen pengembangan kapasitas ini perlu dipantau dan dampaknya terhadap penguatan kemandirian masyarakat perlu dinilai sebagai salah satu keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri.

- **Pengkajian pencapaian MDGs.** Pelaksanaan PNPM Mandiri diharapkan juga akan berdampak pada percepatan pencapaian MDGs. Melalui berbagai evaluasi sektor terkait kegiatan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat memberikan masukan bagi kebijakan pelayanan dasar masyarakat miskin. Evaluasi terkait dengan aspek ini difokuskan pada mutu investasi, kesinambungan, kepuasan warga, efektivitas biaya, dan hubungan dengan pemerintah setempat dan sektor swasta.

Laporan berkala mengenai kemajuan dan hasil PNPM sangat penting untuk informasi kemajuan pelaksanaan kegiatan (*progress*) dan memastikan ketercapaian kegiatan sesuai rencana (pencapaian program).

Pelaporan akan bermanfaat jika laporan akurat, dapat dipercaya, dan tepat waktu. Semua program sektor di bawah koordinasi PNPM Mandiri menyampaikan laporan berdasarkan seperangkat indikator, yang disajikan dalam Lampiran B pedoman ini. Indikator yang perlu dikembangkan dan dilengkapi oleh indikator masing-masing program sektor.

Kesemua progress dan capaian itu menjadi satu laporan.

Laporan berkala dan akurat akan memungkinkan pemerintah menyebarkan informasi bersangkutan seluas-luasnya kepada departemen, parlemen, dan masyarakat luas dan mengambil tindakan/kebijakan yang diperlukan. Informasi tersebut juga akan ditayangkan melalui *website* PNPM Mandiri.

Laporan program pada berbagai tingkatan bersifat laporan bulanan, kuartal, dan tahunan. Format laporan berkala dikembangkan oleh masing-masing program sektor (*lihat kembali tabel 1*).



K keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri untuk mencapai tujuannya perlu ditunjang oleh pemantauan dan evaluasi yang memadai. Untuk itu, seluruh program yang tergabung dalam PNPM Mandiri perlu melakukan pemantauan dan evaluasi dengan mengacu Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PNPM Mandiri ini. Bila dikemudian hari terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, maka akan dilakukan penyempurnaan terhadap pedoman ini.

Kerangka Logis PNPM Mandiri

No.	Tujuan Khusus	Keluaran	Indikator Keberhasilan	2009	2012	Sumber Data	Keterangan
1.	Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yg rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.	Masyarakat luas terlibat di dalam setiap tahap pengelolaan pembangunan.	Rata-rata keterlibatan masyarakat di dalam pengelolaan PNPM Mandiri: <ul style="list-style-type: none"> • penduduk dewasa miskin, rentan, dan komunitas adat/ terpencil • perempuan 	40% 40%	60% 50%	MIS/SPI	Pengelolaan PNPM Mandiri dimaksud adalah mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan. Persentase keterlibatan diperhitungkan berdasarkan keterlibatan rata-rata kelompok sasaran di dalam setiap tahapan pengelolaan PNPM Mandiri. Kategori penduduk dewasa adalah penduduk dengan usia ≥ 18 tahun atau sudah kawin atau sering disebut penduduk yang telah memiliki hak pilih.
	Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap berbagai pelayanan dasar seperti: pendidikan, kesehatan, sanitasi dan air bersih, dan lain sebagainya.	Meningkatnya pemanfaatan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sanitasi oleh keluarga miskin.	Kunjungan keluarga miskin ke fasilitas pelayanan kesehatan. Partisipasi siswa pendidikan dasar.	## ##	## ##	MIS/SPI MIS/SPI	Perkembangan data didapat dari <i>baseline survey</i> dan lanjutannya. Terkait sektor pendidikan dan kesehatan, pencapaian didapat dari komponen PNPM Generasi.
		Meningkatnya pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.	Tingkat pemanfaatan infrastruktur dasar.	##	##	Evaluasi MIS/SPI dan Evaluasi	Indikator diperhitungkan berdasarkan lokasi-lokasi PNPM Generasi.

No.	Tujuan Khusus	Keluaran	Indikator Keberhasilan	2009	2012	Sumber Data	Keterangan
		Meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin, terutama kesehatan ibu dan anak.	<p>Indikator hasil</p> <p>Penurunan indikator-indikator kesehatan dan pendidikan pada 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tingkat kematian ibu melahirkan turun dari 307 (per 100.000 kelahiran hidup) pada 2002 menjadi 97 pada 2015. Tingkat kematian bayi turun dari 34,7% (2004) menjadi 19% pada 2015. Tingkat kurang berat badan/kurang gizi pada anak usia 5 tahun turun dari 27,5% (pada 2004) menjadi 17,8 pada 2015. Hasil belajar meningkat seperti tercermin dalam nilai ujian akhir nasional. <p>Indikator kesehatan dan pendidikan meningkat paling tidak di 230 kecamatan, di 20 kabupaten:</p>				Partisipasi siswa pendidikan dasar dihitung berdasarkan tingkat kehadiran siswa pendidikan dasar (kelas 1 s/d 9 sekolah dasar). Infrastruktur/prasarana dasar adalah air bersih, pembuangan air limbah dan persampahan, sanitasi lingkungan, jalan/jembatan, dsb. Tingkat pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dasar salah satunya dinilai berdasarkan persentase kondisi layak dari prasarana dasar secara umum di desa/kelurahan wilayah sasaran program.

LAMPIRAN

No.	Tujuan Khusus	Keluaran	Indikator Keberhasilan	2009	2012	Sumber Data	Keterangan
			<p>Kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cakupan imunisasi untuk bayi umur 12-23 bulan meningkat, dari 38% pada 2005 menjadi 48% pada 2009. Kunjungan pra-melahirkan naik, dari 56% pada 2005 menjadi 66% pada 2009. Melahirkan dibantu bidang terlatih naik, dari 40% pada 2005 menjadi 50% pada 2009. Gizi: % anak kurang gizi menurut angka berat badan untuk bayi usia 0-11 bulan turun, dari 29% pada 2004 menjadi 19% pada 2009. Vitamin A: % anak di bawah 5 tahun yang mendapat 2 kapsul Vit A selama 12 bulan terakhir naik, dari 62% pada 2004 menjadi 72% pada 2009. 				

No.	Tujuan Khusus	Keluaran	Indikator Keberhasilan	2009	2012	Sumber Data	Keterangan
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel.	<p>Terwujudnya lembaga-lembaga masyarakat yang memenuhi kriteria dan prasyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> representatif (<i>dibentuk berdasar keswadayaan masyarakat</i>) dipercaya masyarakat dan mampu mendorong partisipasi masyarakat 	<p>Pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Murid SD terdaftar naik dari 96,5% pada 2005 menjadi 97% pada 2009. Murid SMP terdaftar naik dari rata-rata 57% pada 2006 menjadi 72% pada 2009. Hasil tes matematika dan bahasa Indonesia naik 5% poin dari data dasar survei. 	60%	100%	MIS/SPI	Persentase terbentuknya lembaga keswadayaan masyarakat dihitung berdasarkan jumlah desa/kelurahan yang menjadi sasaran program dan diprioritaskan kepada desa-desa tertinggal.
			<ul style="list-style-type: none"> Lembaga masyarakat telah representatif, aspiratif, dan akuntabel. 	-	60%	Evaluasi	Keberadaan lembaga keswadayaan masyarakat (LKM) yang telah merepresentasikan masyarakat, mampu menggalang partisipasi masyarakat, mampu mengawal aspirasi masyarakat, dan pengelolannya telah akuntabel akan diukur melalui kajian/studi evaluasi yang dikembangkan oleh program-program.

LAMPIRAN

No.	Tujuan Khusus	Keluaran	Indikator Keberhasilan	2009	2012	Sumber Data	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> mampu mengelola kegiatan pembangunan. 					
3	Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin, melalui kebijakan, program, dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (<i>pro-poor</i>).	<p>Tersedia anggaran pemerintah daerah sebagai dana pendamping dari dana PNPM Mandiri yang akan dikelola oleh masyarakat.</p>	<p>Dana pendamping dari Kabupaten/Kota:</p> <ul style="list-style-type: none"> kapasitas fiskal rendah sebesar 20% kapasitas fiskal tinggi sebesar 50% 	50%	80%	MIS/SPI	Dana pendamping daerah (Kabupaten/kota) dapat lebih besar dari yang disyaratkan. Semakin besar dana pendamping, menunjukkan semakin besar pula <i>awareness</i> (kepedulian) pemerintah daerah dalam upaya memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.
4	Meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengaktifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.	Adanya kontribusi lembaga non pemerintah dalam mendukung kegiatan PNPM Mandiri.	Desa/kelurahan PNPM Mandiri yang memperoleh dukungan/bantuan dari lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat.	15%	40%	Evaluasi	Persentase dapat diukur dengan membandingkan antara desa/kelurahan yang memperoleh dukungan lembaga-lembaga non pemerintah terhadap keseluruhan desa/kelurahan yang menjadi sasaran PNPM Mandiri. Dukungan lembaga-lembaga non pemerintah dapat berupa dana atau barang (<i>inatura/in-kind</i>). Penyerahan pengelolaan dana lembaga-lembaga non-pemerintah sebagian atau seluruhnya kepada masyarakat sesuai pola PNPM Mandiri dapat menjadi salah satu diantaranya.

No.	Tujuan Khusus	Keluaran	Indikator Keberhasilan	2009	2012	Sumber Data	Keterangan
5	Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.	Adanya program-program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang digagas oleh pemerintah daerah dan kelompok peduli selain PNPMM Mandiri.	Adanya program-program pemberdayaan masyarakat dan atau penanggulangan kemiskinan dari gagasan daerah. Efektifitas program-program daerah dalam memberdayakan masyarakat dan atau menanggulangi kemiskinan.	10%	30%	MIS/SPI	Salah satu potensi dukungan/bantuan dimaksud adalah CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>). Persentase dihitung berdasarkan kabupaten/kota yang telah memiliki program-program pemberdayaan masyarakat dan atau penanggulangan kemiskinan terhadap seluruh kabupaten/kota sasaran PNPMM Mandiri. Efektifitas dinilai melalui pengukuran pengurangan penduduk miskin serta pendapatan per kapita miskin serta indikator sektoral lainnya yang dirumuskan oleh masing-masing program.
6	Meningkatkan modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.	Berkembangnya budaya gotong royong dan <i>voluntarism</i> . Berkembangnya budaya masyarakat melalui PNPMM Mandiri.	Adanya dukungan masyarakat terhadap kegiatan PNPMM Mandiri secara sukarela. Adanya budaya-budaya lokal yang memperlancar pelaksanaan kegiatan-kegiatan PNPMM Mandiri.	10%	40%	Evaluasi	Penilaian dilakukan terhadap kabupaten/kota yang telah mengembangkan budaya gotong royong, kerelawanan sosial, dan budaya lokal lainnya yang mendukung kegiatan PNPMM Mandiri terhadap seluruh kabupaten/kota sasaran program.

LAMPIRAN

No.	Tujuan Khusus	Keluaran	Indikator Keberhasilan	2009	2012	Sumber Data	Keterangan
7	Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi, dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.	Kemudahan akses informasi PNPM Mandiri. Kemudahan akses komunikasi berbagai pertanyaan dan permasalahan PNPM Mandiri. Munculnya dan di dayagunakannya berbagai ino-asi untuk pengembangan PNPM Mandiri.	Desa/kelurahan yang telah menggunakan media informasi (<i>brosur/papan informasi/media elektronik/media cetak</i>) tentang informasi PNPM Mandiri yang dapat diakses oleh masyarakat miskin. Tersedianya pusat/unit informasi di kecamatan yang dapat diakses oleh masyarakat miskin sebagai tempat bertanya, berkonsultasi, atau mengadakan program. Ada terobosan dalam mengefektifkan dan mengefisienkan pengelolaan program.	40%	100%	MIS/SPI	Persentase desa/kelurahan yang telah menggunakan media informasi dalam mensosialisasikan PNPM Mandiri dihitung berdasarkan seluruh desa/kelurahan yang menjadi sasaran PNPM Mandiri. Persentase kecamatan yang telah mengembangkan unit informasi diperhitungkan berdasarkan jumlah kecamatan yang menjadi sasaran PNPM Mandiri. Persentase inovasi pengelolaan program dinilai berdasarkan jumlah kecamatan yang menjadi sasaran PNPM Mandiri.



LAMPIRAN B RINGKASAN INDIKATOR INTI

Daftar ini mencakup indikator kinerja program dalam lampiran A. Namun karena setiap program sektor memiliki fokus sektornya sendiri-sendiri, tidak tertutup kemungkinan bagi masing-masing program sektor tersebut untuk mengumpulkan indikator-indikator lainnya yang sesuai dengan garis kebijakan program sektornya.

Indikator dalam daftar di bawah harus digunakan untuk menyusun laporan berkala, sehingga pemerintah pusat dan daerah dapat menyampaikan laporan kepada para pengambil kebijakan, parlemen, dan masyarakat luas mengenai kemajuan PNPM Mandiri.

Pemantauan dan evaluasi melalui berbagai studi kasus dapat melengkapi informasi pelaporan rutin yang dilakukan oleh para pihak.

No	INDIKATOR UTAMA	SUMBER
A. Informasi Umum		
1	Nama Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/ Kelurahan cakupan wilayah pemantauan	Pemda setempat
2	Jumlah penduduk, penduduk berdasarkan usia, jumlah penduduk miskin berdasarkan usia, jumlah perempuan berdasarkan usia, jumlah masyarakat marjinal di wilayah bersangkutan	Pemda setempat
3	Jumlah penerima langsung manfaat proyek (L/P) di wilayah bersangkutan	Fasilitator
4	Alokasi BLM (Rp) untuk wilayah bersangkutan, menurut provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan	Tim Koordinasi PNPM Mandiri
5	Nama kecamatan dan desa/kelurahan yang memperoleh dana PNPM Mandiri	Tim Koordinasi PNPM Mandiri dan PjOK
B. Partisipasi Masyarakat		
6	Jumlah penduduk miskin dewasa dan kelompok lain (perempuan, marjinal, rentan) (L/P) dan persentasenya yang mengikuti pertemuan musyawarah pembangunan (penetapan proyek)	Fasilitator
7	Mutu partisipasi penduduk miskin dewasa dan kelompok lain (perempuan, marjinal, rentan) (L/P) yang mengikuti pertemuan musyawarah pembangunan (penetapan proyek)	Fasilitator

No	INDIKATOR UTAMA	SUMBER
C. Representasi		
8	Jumlah pokmas yang dipercaya masyarakat untuk mengelola kegiatan	Fasilitator
9	Jumlah anggota masing-masing pokmas	Fasilitator
D. Proyek/Kegiatan		
10	Jenis-jenis kegiatan/proyek yang didanai oleh PNPM Mandiri dan sumber usulan (jelaskan kelompok atau desa/kelurahannya)	PjOK dan Fasilitator
11	Jenis-jenis kegiatan/proyek yang tidak didanai oleh PNPM Mandiri dan sumber usulan (jelaskan kelompok atau desa/kelurahannya)	Fasilitator
12	Besar sumbangan masyarakat/swasta (Rp)	Fasilitator, Lurah/Kepala Desa, Camat, Pokmas
D.1. Fisik Infrastuktur		
13	Jumlah hari kerja (HOK) dalam pengerjaan proyek	Fasilitator
14	Jumlah warga miskin dan kelompok sasaran lain yang bekerja untuk proyek dan jumlah warga non sasaran yang bekerja untuk proyek	Fasilitator
15	Jumlah proyek kualitas baik dan buruk	Fasilitator teknis
16	Jumlah kelompok masyarakat yang dipercaya selaku pengelola operasional dan perawatan	Fasilitator
17	Kelompok operasi dan perawatan terbentuk dan bekerja	Fasilitator teknis
D.2. Ekonomi		
18	Jumlah kelompok masyarakat pengelola ekonomi mikro	Ketua Pokmas Ekonomi
19	Jumlah anggota kelompok sasaran ekonomi mikro	Ketua Pokmas Ekonomi
20	Jumlah prosentase anggota kelompok yang meminjam dana ekonomi PNPM Mandiri	Ketua Pokmas Ekonomi
21	Tingkat pengembalian pinjaman	Ketua Pokmas Ekonomi
22	Jumlah dana yang dikembalikan saat pelaporan (Rp)	Ketua Pokmas Ekonomi
23	Jumlah tunggakan yang belum dikembalikan saat pelaporan (Rp)	Ketua Pokmas Ekonomi
24	Jumlah pengguna pinjaman yang memanfaatkan untuk usaha dan jenis usaha	Ketua Pokmas Ekonomi dan Fasilitator
25	Jumlah usaha yang mengalami peningkatan produktivitas	Ketua Pokmas Ekonomi dan Fasilitator



No	INDIKATOR UTAMA	SUMBER
26	Jumlah usaha yang mengalami peningkatan kualitas produksi	Ketua Pokmas Ekonomi dan Fasilitator
27	Jumlah usaha yang mengalami peningkatan permintaan (<i>demand</i>)	Ketua Pokmas Ekonomi dan Fasilitator
E. Pendapatan kelompok sasaran		
28	Rata-rata peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan kelompok sasaran lainnya	Konsultan Manajemen Wilayah Kabupaten/Kota dan Fasilitator
29	Rata-rata pengeluaran konsumsi pangan dan kebutuhan lainnya dari kelompok sasaran	Konsultan Manajemen Wilayah Kabupaten/Kota dan Fasilitator
F. Keuangan		
30	Komposisi dana APBN dan APBD untuk PNPM Mandiri	Konsultan Manajemen Wilayah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)
31	Jumlah dana dari sumber-sumber lain untuk PNPM Mandiri (donor, LSM, swasta, dll)	Konsultan Manajemen Wilayah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)
32	Jumlah penyerapan dana PNPM Mandiri di wilayah sasaran pada saat pelaporan (progress)	Konsultan Manajemen Wilayah Kabupaten/Kota
G. Pelatihan/Pengembangan Kapasitas		
25	Jumlah pelatihan	Konsultan Manajemen Wilayah Kabupaten/Kota
26	Jenis pelatihan	Konsultan Manajemen Wilayah Kabupaten/Kota
27	Sasaran pelatihan (kelompok sasaran)	Konsultan Manajemen Wilayah Kabupaten/Kota
H. Peningkatan kapasitas pemda		
28	Prosentase anggaran daerah yang pro poor	Konsultan Manajemen Wilayah Kabupaten/Kota
29	Jumlah produk kebijakan (Perda, SK Bupati/Walikota, dll) yang pro poor	Konsultan Manajemen Wilayah Kabupaten/Kota
30	Ada/tidaknya dan berjalan/tidaknya lembaga/unit yang khusus menangani permasalahan kemiskinan	Konsultan Manajemen Wilayah Kabupaten/Kota

No	INDIKATOR UTAMA	SUMBER
31	Adanya/tidaknya peraturan keuangan mikro yang pro poor	Konsultan Manajemen Wilayah Kabupaten/Kota
32	Adanya lembaga kredit yang pro poor	Konsultan Manajemen Wilayah Kabupaten/Kota
33	Prosentase alokasi dana daerah untuk pelestarian lingkungan	Konsultan Manajemen Wilayah Kabupaten/Kota
34	Prosentase penurunan tingkat kerusakan lingkungan di wilayah PNPM Mandiri selama pelaksanaan program	Konsultan Manajemen Wilayah Kabupaten/Kota
I. Administrasi pengelolaan program dan Pemantauan		
35	Status kemajuan untuk setiap tahap siklus proyek untuk masing-masing kecamatan, desa/kelurahan	Konsultan Manajemen Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota
36	Jumlah konsultan/fasilitator (L/P) di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan yang telah ditempatkan dan yang belum	Konsultan Manajemen Pusat
37	Jumlah kunjungan supervisi ke desa/kelurahan oleh pejabat pemerintah atau konsultan wilayah pada saat pelaporan	Fasilitator
38	Jumlah dan jenis keluhan yang masuk dan ditindaklanjuti	Fasilitator
39	Jumlah kunjungan lembaga non pemerintah dan nama lembaga untuk pemantauan dan evaluasi (misal: dari LSM)	Fasilitator
40	Jumlah penyimpangan menurut hasil pemeriksa keuangan (BPK, BPKP, Auditor Publik, Bawasda)	Konsultan Manajemen Pusat dan Wilayah



Pengembangan indikator kinerja dilakukan oleh program sektor dan disosialisasikan ke masing-masing pihak penanggung jawab. Penentuan responden dari pemantauan kualitatif ini menjadi tugas dari program sektor (Konsultan Manajemen Pusat) untuk mengembangkan metode yang akuntabel dan akurat.

Tolok ukur kepuasan penerima manfaat terhadap PNPM Mandiri dan program terkait menjadi bahan utama dalam pemantauan kualitatif ini. Beberapa contoh pertanyaan kualitatif yang dapat diajukan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat

- Siapa saja yang terlibat atau turut serta dalam masing-masing kegiatan sosialisasi program, perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemantauan, dan sebagainya? Bagaimana proses pelibatannya? Apakah perempuan turut serta pada semua tahap? Apakah warga miskin dan marjinal turut dalam kegiatan proyek? Bagaimana pelibatan kelompok tersebut dalam pengambilan keputusan? Bagaimana bentuk partisipasinya?
- Apakah pertemuan/rembug/musyawarah masyarakat dilakukan secara terbuka? Siapa saja yang hadir?
- Adakah ada swadaya atau kontribusi masyarakat? Dalam bentuk apa?

2. Informasi Transparansi

- Adakah informasi mengenai PNPM Mandiri diberikan kepada masyarakat? Apakah informasi tersebut mudah diakses? Apakah warga mudah memahami informasi tersebut?
- Adakah papan pengumuman PNPM Mandiri dan proyek di setiap desa/kelurahan? Informasi apa saja yang dipampangkan di papan pengumuman? Apakah ada papan pengumuman di setiap lokasi proyek?

- Adakah rapat berkala selama pelaksanaan proyek untuk menjelaskan perkembangan proyek kepada warga secara luas?
- Apakah tersedia dokumen mengenai proyek (usulan, rancangan, tanda resmi selesainya proyek, catatan keuangan)? Adakah informasi mengenai siapa yang harus dihubungi jika ada keluhan atau pengaduan? Apakah warga masyarakat tahu siapa yang harus dihubungi jika ingin mendapat penjelasan atau menyampaikan pengaduan?

3. Informasi Proyek

- Proyek yang dibiayai melalui PNPM mandiri di desa/kelurahan itu?
- Mengapa proyek tersebut yang dipilih? Siapa yang mengusulkan dan memutuskan proyek itu? Apakah proyek itu menjadi prioritas bagi wilayah itu?
- Jika proyek infrastruktur, apakah proyek dinilai akan bermutu tinggi dari sisi teknis? Dan kenyataan hasilnya bagaimana? (Fasilitator Teknis memiliki daftar pertanyaan sendiri untuk memeriksa aspek mutu teknis pekerjaan infrastruktur).
- Apakah hasil proyek sepadan dengan biaya yang dikeluarkan? Ketika memeriksa anggaran, apakah biaya satuan dan biaya total realistis?
- Apakah infrastruktur dirawat? Adakah rencana operasi dan perawatan?
- Apakah dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek ada koordinasi dengan dinas pemerintah daerah terkait?
- Apakah warga masyarakat puas dengan kegiatan proyek? Apakah proyek memenuhi harapan warga masyarakat?
- Apakah pejabat pemerintah setempat puas dengan kegiatan/proyek? Apakah menurut mereka proyek memenuhi kebutuhan prioritas wilayah bersangkutan?



- Apa manfaat jangka pendek dan jangka panging kegiatan bersangkutan? Apa manfaat dari segi lapangan kerja dan apa manfaat ekonominya?
- Apakah ada masalah yang timbul selama pelaksanaan proyek? Bila ada bagaimana mengatasinya?
- Bagaimana agar proses atau siklus proyek dapat lebih ditingkatkan untuk masa yang akan datang?
- Apakah peraturan sosial dan perlindungan lingkungan hidup diperhatikan? Apakah prosedur yang benar diikuti untuk perlindungan lingkungan hidup, pembebasan lahan, pemberdayaan kelompok sosial, dan sebagainya?

4. Pengembangan Kapasitas

- Pengembangan kapasitas jenis apa yang dilaksanakan PNPM Mandiri? Apakah sudah sesuai dengan harapan penerima manfaat?
- Siapa yang dilatih dan mengenai apa?
- Apakah pejabat pemerintah setempat ikut dalam pelatihan?